



# **RENCANA KERJA**

**2024**

Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan  
Tahun 2023

**RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA – SKPD)  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
Jalan A. Yani No. 118 Purwodadi-Grobogan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kekuatan dan bimbingan Nya Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Tahun 2024 ini dilakukan guna mewujudkan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 untuk pelaksanaan tahun ketiga. Disamping itu juga dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi perbaikan dimasa mendatang.

Demikian harapan kami semoga Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan untuk Tahun 2024.

Purwodadi, Maret 2023  
Kepala Dinas Peternakan dan  
Perikanan Kabupaten Grobogan



**Drh. RIVANTO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630510 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....,,,..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 ..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan..... 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan ..... 15

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas  
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan..... 19

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN..... 32

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..... 32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan..... 35

3.3 Program dan Kegiatan..... 36

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN..... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD Dinas Peternakan  
dan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian  
Renstra-PD Dinas Peternakan dan Kabupaten  
Grobogan..... 8

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan  
Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2022..... 15

Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan  
Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2022..... 17

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada

Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten  
Grobogan Tahun 2024..... 37

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan  
Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju  
Tahun 2025 ..... 40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 273 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Renja-PD adalah dokumen perencanaan yang berlaku satu tahun dan dibuat dengan mengacu pada RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta dengan memperhatikan usulan dari masyarakat (*participatory approach*).

Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026. Renja-PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Grobogan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali, terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan di tahun 2024 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan pertanian di Kabupaten Grobogan.

Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 memuat Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai Tugas pokok fungsi OPD, serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Perubahan Kedua Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
- c. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang peternakan, pertanian, dan perikanan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022**

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada tahun 2022, analisi kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, review terhadap RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS**

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian penutup dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

Kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi Renja-PD dilaksanakan dengan tujuan menganalisis hasil capaian kinerja dengan mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan) terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra.

Evaluasi Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dilaksanakan dengan dengan berpedoman pada Renstra-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Secara rinci hasil evaluasi Renja-PD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD Dinas Peternakan dan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Renstra-PD Dinas  
Peternakan dan Kabupaten Grobogan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.262,00 ton		1.201,62 ton	1.203,207 ton	100,13 %	1.262,00 ton	1.265 ton	100, 21%
3	25	03	2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Cakupan bina kelompok tani nelayan	20,00 %		20,00 %	20,00 %	100 %	20,00 %	20 %	100 %
3	25	03	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	jumlah aplikasi data perikanan tersedia	1,00 aplikasi		1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	1,00 aplikasi	1 aplikasi	100 %
3	25	03	2	01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap ramah lingkungan	15,00 unit				100 %	5,00 unit	5 unit	100 %
3	25	03	2	01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah benih ikan ditebar	325.000,00 ekor		191.900,00 ekor	191.900,00 ekor	100 %	250.000,00 ekor	250.000 ekor	100 %
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	2.730,17 ton		2.587,66 ton	2.592,5 ton	100,18 %	2.730,17 ton	2.731 ton	100, 04%
3	25	04	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya Ikan air tawar yang terbina	3,30 %		1,6 %	1,6 %	100 %	2 %	2 %	100 %
3	25	04	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	8,00 Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok	100 %	5,00 Kelompok	5 Kelompok	100 %
3	25	04	2	03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudidaya ikan yang terdaftar	6,00 %		4 %	4 %	100 %	4,00 %	4 %	100 %
3	25	04	2	03	01	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudidaya ikan yang terdaftar	6,00 %		4 %	4 %	100 %	4,00 %	4 %	100 %
3	25	04	2	04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan memperoleh sarana produksi perikanan	11,00 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	100 %	8,00 Kelompok	8 Kelompok	100 %

3	25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	11,00 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	100 %	8,00 Kelompok	8 Kelompok	100 %
3	25	04	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pakan ikan tersedia di BBI	5.606,19 Kg		3.481 Kg	3.481 Kg	100 %	3.829 Kg	3.829 Kg	100 %
3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk olahan ikan	322,57 Ton		298,88 ton	301,66 ton	100,93 %	304,26 Ton	307 ton	101,01%
3	25	06	2	03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha pengolahan ikan yang terbina	20,00 %		20 %	20 %	100 %	20,00 %	20 %	100 %
3	25	06	2	03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah siswa dan masyarakat peserta Gemarikan	1.650,00 Siswa		1.150 Siswa	1.150 Siswa	100 %	1.500,00 Siswa	1.500 Siswa	100 %
3	25	06	2	03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan terbina	350,00 Pengusaha		250 Pengusaha	250 Pengusaha	100 %	275 Pengusaha	275 Pengusaha	100 %
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100%		100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %
3	27	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%		100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %
3	27	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	2,00 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	2,00 Dokumen	2 Dokumen	100 %
3	27	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	10,00 Buah		20,00 Buah	20,00 Buah	100 %	10,00 Buah	10 Buah	100 %
3	27	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %
3	27	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14,00 Bulan		14,00 Bulan	14,00 Bulan	100 %	14,00 Bulan	14 Bulan	100 %
3	27	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	10,00 Dokumen		20,00 Dokumen	20,00 Dokumen	100 %	10,00 Dokumen	10 Dokumen	100 %
3	27	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %
3	27	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian	147,00 Stel		294,00 Stel	294,00 Stel	100 %	147,00 Stel	147 Stel	100 %



							Menyurat yang tersedia									
3	27	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 Bulan		12,00 Bulan	12,00 Bulan	100 %	12,00 Bulan	12 Bulan	100 %
3	27	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00 Bulan		12,00 Bulan	12,00 Bulan	100 %	12,00 Bulan	12 Bulan	100 %
3	27	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	259,00 Unit		232,00 Unit	232,00 Unit	100 %	237,00 Unit	237 unit	100 %
3	27	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	21,00 Unit		13,00 Unit	13,00 Unit	100 %	15,00 Unit	15 unit	100 %
3	27	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	230,00 Unit		213,00 Unit	213,00 Unit	100 %	215,00 Unit	215 unit	100 %
3	27	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	8,00 Unit		6,00 Unit	6,00 Unit	100 %	7,00 Unit	7 unit	100 %
3	27	02					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %
3	27	02	2	03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan	75,00 %		72,00 %	72,00 %	100 %	73,00 %	73 %	100 %
3	27	02	2	03	01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah petugas tehnis reproduksi ( ATR, PKB, Inseminatir ) terlatih	52,00 Orang		52,00 Orang	52,00 Orang	100 %	52,00 Orang	52 orang	100 %
3	27	02	2	05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peternak terbina	15,00 %		11,00 %	11,00 %	100 %	12,00 %	12 %	100 %
3	27	02	2	05	06		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah peternak terbina	1.490,00 Peternak		1.120,00 Peternak	1.120,00 Peternak	100 %	1.232 Peternak	1.232 Peternak	100 %
3	27	02	2	06			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kelompok tani ternak penerima bantuan	22,00 %		16,00 %	16,00 %	100 %	18,00 %	18 %	100 %
3	27	02	2	06	01		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	761,00 Ekor		712,00 Ekor	712,00 Ekor	100 %	629 Ekor	629 Ekor	100 %
3	27	02	2	06	02		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit rumput unggul dan bibit legum yang diadakan (bibit indigovera)	35.000,00 Buah		22.930 Buah	22.930 Buah	100 %	23.026 Buah	23.026 Buah	100 %
3	27	03					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	100,00 %		100,00 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %
3	27	03	2	02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang jalan produksi	2,5 km		2,5 km	2,5 km	100 %	2,5 km	3 Unit	100 %





3	27	07	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	8,00 Kelompok		7,00 Kelompok	7,00 Kelompok	100 %	8,00 Kelompok	8 Kelompok	100 %
3	27	07	2	01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah kelompok pengolah hasil peternakan terbina	2,00 Kelompok		2,00 Kelompok	2,00 Kelompok	100 %	2,00 Kelompok	2 Kelompok	100 %

Hasil evaluasi pada Tabel 2.1 di atas dapat diuraikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Capaian Renja-PD Tahun 2022

- a. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 8 Program dengan total 10 indikator dengan hasil pencapaian predikat capaian sangat tinggi pada capaian di 9 indikator dan predikat capaian tinggi pada 1 indikator. Satu indikator dengan predikat tinggi yaitu realisasi Persentase kelompok tani ternak terbina sebanyak 59,16 % dibandingkan dengan target sebanyak 60 % (yang berarti tidak mencapai target yang ditentukan). Indikator tersebut tidak tercapai dikarenakan kurangnya minat peternak mengikuti pelatihan dan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.
- b. Dari 21 Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022, terdapat total 21 indikator keluaran / output dengan capaian dengan hasil kinerja keseluruhan sangat tinggi (100%).

2) Capaian Renstra-PD Tahun 2022

- a. Pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan terdiri dari 10 Program dan 24 Kegiatan. Tahun anggaran 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra PD periode 2021-2026.
- b. Berdasarkan prediksi tahun 2024 maka capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :
  - Dari 10 Program dengan 12 indikator kinerja (*outcome*), keseluruhannya diprediksi dapat tercapai sampai dengan akhir tahun renstra 2026.
  - Dari 24 Kegiatan dengan 25 indikator kinerja (*output*), keseluruhan capaiannya diprediksi dapat tercapai pada akhir tahun renstra 2026 dengan tingkat capaian tinggi dan sangat tinggi. Capaian kinerja terutama pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sangat dipengaruhi dengan situasi sekarang ini dengan adanya wabah penyakit hewan (Penyakit Mulut dan Kuku dan Penyakit LSD pada ternak ruminansia) yang menyerang ternak masyarakat. Dampak adanya penyakit ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas ternak yang berakibat penurunan populasi ternak di Kabupaten Grobogan. Akan tetapi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan optimis bisa mengatasi wabah dengan Kerja keras dan Kerjasama yang solid dengan berbagai kegiatan penanganan dan pengendalian penyakit oleh petugas Kesehatan hewan di lapangan dan masyarakat.

**2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu OPD dibawah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada petani dan peternak di Kota Semarang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsung pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Analisis ini dilakukan terhadap target dan realisasi tahun 2022, dengan menyandingkan data realisasi tahun 2021 sebagaimana tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Target Akhir RPJMD	% realisasi terhadap target akhir RPJMD
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Populasi ternak	Persentase pertumbuhan populasi ternak unggulan	2 %	2,23 %	111,57 %	2 %	96,79 %
2.	Meningkatnya produksi perikanan	Persentase Produksi Perikanan	5,35 %	5,45 %	101,87 %	5,38 %	18,23 %
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</i>					106,72 %		

Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan terdapat 2 (dua) sasaran dengan jumlah indikator sebanyak 2 indikator. Capaian kinerja pada kedua indikator menunjukkan kinerja sangat tinggi, sasaran pertama meningkatnya produksi peternakan berkinerja sangat tinggi dengan capaian kinerja sebesar 111,57 %, sedangkan sasaran kedua meningkatnya produksi perikanan capaian kerjanya 101,93 %.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor peternakan dan perikanan tersebut sangat baik berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan peternakan dan perikanan pada tahun 2022. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : (1) mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk peternakan dan perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi; (2) Mengembangkan diversifikasi usaha pengolahan produk peternakan dan perikanan serta strategi pemasaran; (3) Optimalisasi penggunaan teknologi dan sumber daya peternakan dan perikanan; (4) Meningkatkan pelayanan

kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular strategis; (5) Penguatan kelembagaan petani; (6) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan; (7) Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas peternakan dan perikanan; (8) Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas peternakan dan perikanan.

Dari Tabel 2.3 (terlampir pada halaman selanjutnya) terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, 9 indikator capaian terhadap Renstra sangat tinggi (lebih dari 100%) yaitu indikator Jumlah produksi perikanan tangkap (100,21 %), indikator Jumlah produksi perikanan budidaya (100,04%), indikator Jumlah produksi produk olahan ikan (101,01%), indikator Persentase pemanfaatan sarana peternakan (100%), indikator Persentase produksi bibit ternak (149,27%), indikator Persentase pemanfaatan prasarana peternakan (100%), indikator Persentase angka kesembuhan hewan (125,14%), indikator Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH (164,98 %), dan indikator Persentase pemberian rekomendasi izin unit usaha produksi peternakan (100%). Sedangkan 1 indikator lainnya yaitu Persentase kelompok tani ternak terbina capaiannya Renstra masuk kategori tinggi (98,60%) akan tetapi tidak memenuhi target renstra yaitu sebesar 100%. Prediksi capaian Renstra tahun 2024 untuk kedua indikator tersebut adalah kategori sangat tinggi sehingga target di akhir periode Renstra 2021-2026 optimistis dapat tercapai.

Tabel 2.3

## Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target dan Realisasi Kinerja Program			Target akhir Periode RPJMD 2021-2026	Catatan Analisis
				2020	2021	Tahun 2022				
						Target	Realisasi	% Capaian		
	Kelautan dan Perikanan									
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1144,44	1201,62	1262	1.264,677	100,21	6.978,85	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2452,76	2587,66	2730,17	2.731,192	100,04	15.245,99	
3	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	295,9	298,88	304,26	307,320	101,01	1.582,14	
	Pertanian									
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	NA	100	100	100	100,00	100	
		Persentase produksi bibit ternak	%	NA	38	40	59,71	149,27	46	

5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	100	100	100,00	100	
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	%	72	73	74	92,60	125,14	77	
		Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	55	55,5	56	92,39	164,98	58	
7	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	80	100	100	100	100,00	100	
8	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	46	55	60	59,16	98,60	80	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2022 sudah baik, dimana sebagian besar indikator capaiannya 100%, bahkan beberapa indikator capaiannya melampaui 100%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yang harus ditangani, yaitu:

- 1) Adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak berteracak (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, dan Babi) yang mulai merebak di awal tahun 2022 dan penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) pada sapi di akhir tahun 2022 berdampak terhadap perekonomian peternak Grobogan dikarenakan rendahnya produktivitas ternak dan menyebabkan penutupan sementara pasar ternak untuk menghindari potensi penularan PMK antar daerah.
- 2) Penanganan penyakit PMK (penyuntikan vaksin dan pengobatan PMK) secara serempak di masyarakat masih terkendala adanya penolakan dari masyarakat yang belum paham tentang bahaya penyakit PMK.
- 3) Pengetatan lalu lintas hewan antar daerah dan peredaran produk hewan antar daerah sulit diterapkan.
- 4) Penurunan produktivitas ternak terutama ternak indukan karena wabah PMK.
- 5) Ketersediaan pakan ternak baik kualitas maupun kuantitas terutama di musim kemarau masih menjadi kendala dalam meningkatkan produksi maupun produktifitas ternak.
- 6) Rendahnya tingkat pemahaman petani peternak dan pembudidaya ikan dalam pengelolaan usaha ternak dan ikannya.
- 7) Inovasi teknologi yang sudah disampaikan oleh petugas penyuluh dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dan ikan belum semuanya dilaksanakan oleh peternak maupun pembudidaya ikan.
- 8) Ketersediaan air yang kurang kontinyu terutama pada musim kemarau menghambat peningkatan produksi ikan.
- 9) Tingginya biaya produksi budidaya ikan karena tingginya harga pakan ikan.



- 10) Keterbatasan modal, sarana dan prasarana yang dimiliki pokdakan untuk mendukung proses produksi di dalam pengelolaan perikanan.
- 11) Rendahnya Penerapan teknologi perikanan terutama dalam penanganan paska panen produk perikanan (Teknologi pengolahan produk perikanan).
- 12) Pemasaran produksi hasil perikanan masih menjadi kendala dikarenakan pembudidaya ikan kesulitan menentukan nilai jual.

#### 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah **“Penguatan daya saing SDM dan perekonomian daerah, didukung peningkatan reformasi birokrasi”**, dengan prioritas dan fokus pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penguatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
- 2) Penguatan kapasitas dan daya saing perekonomian daerah
- 3) Penguatan infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian
- 4) Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang responsif, profesional dan modern

Berdasarkan uraian prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Grobogan diatas, secara khusus Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan berperan pada pelaksanaan Prioritas kedua yaitu **“Penguatan kapasitas dan daya saing perekonomian daerah”**. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul, maka program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 di sajikan melalui Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	URUSAN PERTANIAN					URUSAN PERTANIAN					
I	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	6.544.500.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	10.730.000.000	
			Persentase produksi bibit ternak	%				Persentase produksi bibit ternak	%		
1).	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase produksi bibit ternak	%	200.000.000	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase produksi bibit ternak	%	300.000.000	
a).	Subkegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Laporan	200.000.000	Subkegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil	Laporan	300.000.000	
2).	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase peternak terbina	%	200.000.000	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase peternak terbina	%	200.000.000	
a).	Subkegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	200.000.000	Subkegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	200.000.000	
3).	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase kelompok tani ternak penerima bantuan	%	6.144.500.000	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase kelompok tani ternak penerima bantuan	%	10.230.000.000	

a).	Subkegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	5.705.000.000	Subkegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	10.000.000.000	
b).	Subkegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	439.500.000	Subkegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	230.000.000	
II	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pemanfaatan prasarana peternakan</b>	%	<b>1.783.850.000</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pemanfaatan prasarana peternakan</b>	%	<b>1.570.000.000</b>	
1).	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Panjang jalan produksi peternakan</b>	M	<b>1.783.850.000</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Panjang jalan produksi peternakan</b>	M	<b>1.570.000.000</b>	
			<b>Persentase pemenuhan standar RPH</b>	%				<b>Persentase pemenuhan standar RPH</b>	%		
a).	Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1.183.850.000	Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	950.000.000	
b).	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	220.000.000	
c).	Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	400.000.000	Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	400.000.000	
III	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase angka kesembuhan hewan	%	<b>840.000.000</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase angka kesembuhan hewan	%	<b>840.000.000</b>	
			Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%				Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%		
1).	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali</b>	%	<b>200.000.000</b>	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali</b>	%	<b>200.000.000</b>	
a).	Subkegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	200.000.000	Subkegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	200.000.000	
2).	<b>Kegiatan Pengawasan</b>	Dinas Peternakan	<b>Persentase hewan</b>	%	<b>90.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengawasan</b>	Dinas	<b>Persentase hewan</b>	%	<b>90.000.000</b>	

	Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	dan Perikanan	keluar/masuk kabupaten yang terawasi			Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Peternakan dan Perikanan	keluar/masuk kabupaten yang terawasi			
a).	Subkegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	90.000.000	Subkegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	90.000.000	
3).	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pelayanan Jasa Medik Veteriner	%	300.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pelayanan Jasa Medik Veteriner	%	300.000.000	
a).	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	300.000.000	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	300.000.000	
4).	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	250.000.000	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	250.000.000	
a).	Subkegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	200.000.000	Subkegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	200.000.000	
b).	Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	50.000.000	Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	50.000.000	
IV	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	-	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	-	
1)	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase unit usaha produksi peternakan terawasi	%	-	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase unit usaha produksi peternakan terawasi	%	-	
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	-	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	-	

	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi	Laporan	-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi	Laporan	-	
V	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase kelompok tani ternak terbina</b>	%	500.050.000	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase kelompok tani ternak terbina</b>	%	790.000.000	
1).	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase kelompok tani ternak terbina</b>	Kelompok	500.050.000	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase kelompok tani ternak terbina</b>	Kelompok	790.000.000	
a).	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	200.000.000	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		
b).	Subkegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	100.50.000	Subkegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Unit	100.50.000	
c).	Subkegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan			200.000.000	Subkegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan			200.000.000	
VI	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP</b>	%	11.632.748.000	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP</b>	%	11.131.566.659	
1).	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berkualitas yang tersusun</b>	%	133.585.000	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berkualitas yang tersusun</b>	%	155.000.000	
a).	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	119.142.500	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	140.000.000	
b).	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14.442.500	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15.000.000	
2).	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN, dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	%	6.327998.000	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN, dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	%	6.414.492.720	

a).	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Dinas Peternakan dan Perikanan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	6.301.622.000	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	6.320.923.720	
b).	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	26.376.000	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	93.569.000	
3).	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	%	<b>297.664.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	%	<b>292.090.000</b>	
a).	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	94.964.000	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	92.062.000	
b).	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	202.700.000	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200.028.000	
4).	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</b>	%	<b>2.127.932.500</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu</b>	%	<b>2.050.483.600</b>	
a).	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	53.600.000	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	104.570.000	
b).	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	524.000.000	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	345.840.000	
c).	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	209.516.000	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	232.168.600	
d).	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	21.000.000	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	20.000.000	
e).	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	205.716.500	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	205.717.000	
f).	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.100.600.000	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.122.133.000	

g).	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan			13.500.000	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Peternakan dan Perikanan			20.055.000	
5).	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</b>	%	<b>403.213.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu</b>	%	<b>700.000.000</b>	
a).	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedaakan	Unit	403.213.000	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedaakan	Unit	700.000.000	
6).	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>1.266.900.500</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	<b>727.300.000</b>	
a).	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	17.300.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	17.300.000	
b).	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	259.600.500	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	290.000.000	
c).	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	990.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	420.000.000	
7).	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	Unit	<b>1.075.455.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	Unit	<b>792.200.339</b>	
a).	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	327.780.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	300.000.000	
b).	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150.600.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	207.636.000	
c).	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	597.075.000	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	284.564.339	
	<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
I.	<b>Program Pengelolaan</b>	Dinas Peternakan	<b>Jumlah produksi</b>	Ton	<b>475.000.000</b>	<b>Program Pengelolaan</b>	Dinas	<b>Jumlah produksi</b>	Ton	<b>475.000.000</b>	

	Perikanan Tangkap	dan Perikanan	perikanan tangkap			Perikanan Tangkap	Peternakan dan Perikanan	perikanan tangkap			
1).	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tingkat Cakupan bina kelompok tani nelayan	%	475.000.000	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tingkat Cakupan bina kelompok tani nelayan	%	475.000.000	
a).	Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten / Kota yang Tersedia	Dokumen	75.000.000	Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten / Kota yang Tersedia	Dokumen	75.000.000	
b).	Subkegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	100.000.000	Subkegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	100.000.000	
c).	Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	300.000.000	Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Peternakan dan Perikanan	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	300.000.000	
II	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.340.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.411.000.000	
1).	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pembudidaya ikan air tawar yang terbina	%	750.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pembudidaya ikan air tawar yang terbina	%	750.000.000	
a).	Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	750.000.000	Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	750.000.000	
2).	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pembudidaya ikan yang terdaftar	%	50.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase pembudidaya ikan yang terdaftar	%	121.000.000	
a).	Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rekomendasi	50.000.000	Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rekomendasi	121.000.000	
3).	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan memperoleh sarana produksi perikanan	Orang	540.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah pembudidaya ikan memperoleh sarana produksi perikanan	Orang	540.000.000	



a).	Subkegiatan Peyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	450.000.000	Subkegiatan Peyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	450.000.000	
b).	Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	90.000.000	Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	90.000.000	
<b>III</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan</b>	Ton	<b>500.000.000</b>	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan</b>	Ton	<b>370.000.000</b>	
<b>1).</b>	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase usaha pengolahan ikan yang terbina</b>	%	500.000.000	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Dinas Peternakan dan Perikanan	<b>Persentase usaha pengolahan ikan yang terbina</b>	%	370.000.000	
a).	Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	250.000.000	Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	290.000.000	
b).	Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Orang	250.000.000	Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Orang	90.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan hasil dari usulan-usulan yang terangkum dalam Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai Dinas Peternakan dan Perikanan di tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan penelaahan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2023, usulan yang masuk untuk diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tahun 2023 yaitu berupa hibah barang (berupa ternak, bibit ikan, perkolaman rakyat, dan rehab kandang). Rekapitulasi hasil Musrenbang Kota yang diajukan ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dan diakomodir dalam kegiatan Renja 2024 disajikan dalam Table 2.5 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

NO	Prpgram / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bansos Ternak Sapi Desa Gunungtumpeng	KARANGAYUNG	Terealisasinya Pengembangan Ternak Sapi	10 Ekor	70.000.000,00
2	Bansos Ternak Kambing Desa Gunungtumpeng	KARANGAYUNG	Terealisasinya Pengembangan Ternak Sapi	40 Ekor	60.000.000,00
3	Bantuan Ternak Kambing Ds. Ketro	KARANGAYUNG	Terealisasinya Pengembangan Ternak Kambing	100 Ekor	240.000.000,00
4	Bantuan Ternak Kambing Ds. Mojoagung	KARANGAYUNG	Terealisasinya Pengembangan Ternak Kambing	100 Ekor	240.000.000,00
5	Bantuan Ternak Sapi Ds. Cekel	KARANGAYUNG	Terealisasinya Bantuan Ternak Sapi Ds. Cekel	50 Ekor	1.000.000.000,00
6	Bantuan perikanan kolam terpal	PENAWANGAN	Mayarakat Petani Blok S 12 Desa Wolo	1 Kegiatan	1.000.000.000,00
7	Pembangunan Kandang Sapi Komunal	PENAWANGAN	BUMDesa Mubarak Desa Jipang	1 Paket	300.000.000,00
8	Bantuan Benih Ikan Nila	PENAWANGAN	Masyarakat Petani Peternak	1 Paket	300.000.000,00
9	Bantuan Peternak lele	TOROH	Desa Pilangpayung		100.000.000,00
10	Bantuan Peternak Sapi	TOROH	Dusun Jalakan		100.000.000,00
11	Bantuan Kelompok Tani	TOROH	Desa Krangganharjo		100.000.000,00
12	Bantuan Peternak Sapi	TOROH	Desa Boloh	5 Klp	200.000.000,00
13	Bantuan Peternak lele	TOROH	Desa Genengadal		50.000.000,00

14	Bantuan Bibit Ternak Kambing (Kelompok Tani)	TOROH	Desa Katong		80.000.000,00
15	Pengembangan ternak sapi Desa Mangunrejo	PULOKULON			500.000.000,00
16	Bantuan Kelompok Ternak ( 4 Kelompok )	PULOKULON			200.000.000,00
17	Pengembangan Usaha Ternak sapi Desa Sembungharjo	PULOKULON			300.000.000,00
18	Pengembangan Ternak Sapi Dsn Krajan Desa Jetaksari	PULOKULON			350.000.000,00
19	Pengembangan Ternak Sapi Dsn Gangin Jetaksari	PULOKULON			350.000.000,00
20	Pengembangan Ternak Sapi/Kambing dsn Krajan Desa Panunggalan	PULOKULON			200.000.000,00
21	Pengembangan Usaha Ternak sapi Desa Jatiharjo	PULOKULON			300.000.000,00
22	Pengembangan Kelompok Ternak Sapi Desa Pojok	PULOKULON			200.000.000,00
23	Gaduh Ternak Sapi	KRADENAN			3.000.000.000,00
24	Ternak Kambing Desa Kalipang	GABUS	Meningkatnya Usaha Peternakan untuk mendukung Usaha Ketahanan Pangan	20 ekor	50.000.000,00
25	Bantuan Ternak Sapi dan Kambing di Desa Karangrejo	GABUS	Meningkatnya Usaha Peternakan untuk mendukung Usaha Ketahanan Pangan	2 Kelompok	250.000.000,00
26	Bantuan Ternak Sapi dan Kambing di Desa Tahunan	GABUS	Meningkatnya Usaha Peternakan untuk mendukung Usaha Ketahanan Pangan	2 Kelompok	250.000.000,00
27	Bantuan Bibit Ternak sapi (Dokoro)	WIROSARI	Peningkatan perekonomian masyarakat	3 Kelompok	300.000.000,00
28	Pengembangan Agribisnis Ternak Kambing Jawarandu dikampung KB Desa Rejosari	GROBOGAN	Terlaksananya Pengembangan Agribisnis ternak Kambing Jawarandu sebagai usaha sampingan dalam rumah tangga yang akan dilaksanakan di KTT SIDO LESTARI I dan SIDO LESTARI II Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan	40 ekor kambing betina	120.000.000,00
29	Budidaya Ikan Lele Ds. Lemahputih	BRATI	Terlaksananya Budidaya Ikan Lele	1 Paket	100.000.000,00
30	Bantuan Ternak Lele Ds. Temon	BRATI	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	500.000 Bibit	125.000.000,00
31	Bantuan Bibit Lele Desa Katekan	BRATI	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	50.000 Bibit	100.000.000,00
32	Ternak Kambing	KLAMBU	Terlaksananya Ternak Kambing Desa Menawan	1 Kegiatan	50.000.000,00
33	Peternakan Kambing (@10 Kambing)	KLAMBU	Terciptanya Kesejahteraan Desa Wandankemiri	2 KELOMPOK	40.000.000,00

34	Teknologi Tepat Guna Kampung Ternak Ngudi Rejeki	GODONG	Masyarakat Desa Pahesan	1 kegiatan	100.000.000,00
35	Pembangunan Central Pernakan (Sapi,Kerbau&Kambing)	GUBUG	Masyarakat Baturagu	1 Kegiatan	750.000.000,00
36	PELATIHAN BUDI DAYA TERNAK IKAN	TANGGUNGHARJO	Warga Desa Sugihmanik	1 Paket	50.000.000,00
37	BANTUAN TERNAK SAPI, KAMBING, AYAM	TANGGUNGHARJO	Warga Desa Brabo	10 klp	500.000.000,00
38	Pembangunan Kolam Kelompok Ternak Ikan Sumber Rejeki Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggunganharjo	TANGGUNGHARJO		1 Paket	150.000.000,00
39	Pembangunan Kolam Kelompok Ternak Ikan Makmur Desa Mrisi Kecamatan Tanggunganharjo	TANGGUNGHARJO		1 Paket	150.000.000,00
40	Pembangunan Kolam Kelompok Ternak Ikan Umbul Mulyo Desa Kedungwungu Kecamatan Tegowanu	TEGOWANU		1 Paket	150.000.000,00
41	Kelompok Tani Ternak Sapi Maju Makmur Desa Kuwaron Kecamatan Gubug	GUBUG		1 Paket	75.000.000,00
42	Kelompok Tani Ternak Sapi Berkah Jaya Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunganharjo	TANGGUNGHARJO		1 Paket	75.000.000,00
43	Kelompok Tani Ternak Sapi Subur Makmur Desa Deras Kecamatan Kedungjati	KEDUNGJATI		1 Paket	75.000.000,00
44	Kelompok Tani Ternak Sapi Berkah Lumintu Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi	PURWODADI		1 Paket	75.000.000,00
45	Kelompok Tani Ternak Kambing Rahayu Desa Padang Kecamatan Tanggunganharjo	TANGGUNGHARJO		1 Paket	50.000.000,00
46	Kelompok Tani Ternak Kambing Mugi Berkah Desa Mrisi Kecamatan Tanggunganharjo	TANGGUNGHARJO		1 Paket	50.000.000,00
JUMLAH					12.175.000.000,00

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Tema Pembangunan Nasional yang diangkat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Tema ini dijabarkan ke dalam 7 Prioritas Nasional, yaitu:

1. PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. PN 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. PN 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. PN 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. PN 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan public

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Presiden tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta;
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective, Sasaran Strategis periode Tahun 2020-2024 adalah :

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- 2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- 3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- 4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
- 5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- 6) Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
- 7) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
- 8) Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- 9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas;

Pemerintah menetapkan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komunitas Andalan Negeri) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) NO 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri sebagai program untuk meningkatkan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, dengan pendekatan mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Melalui upaya khusus ini sapi/kerbau betina produktif milik peternak dipastikan dikawinkan, baik melalui inseminasi buatan (IB) atau Kawin Alam.

Telaahan Kebijakan Nasional dan Program/Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan komoditas pangan (susu, daging telur) telah sesuai dengan program/kegiatan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan diharapkan mampu secara signifikan memberikan kontribusi nasional terhadap capaian produksi daging, susu, telur.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dijelaskan bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.

Sedangkan fungsinya yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;



- 4) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- 5) Pengelolaan kesekretariatan dinas;
- 6) UPTD; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan fungsinya.

Adapun Urusan yang menjadi kewenangan OPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan mengacu kepada Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana tertuang dalam lampiran A.I Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah :

1. Urusan Pertanian
2. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan Tupoksi serta Kewenangan yang telah diberikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan, dan dengan visi Kepala Daerah terpilih yaitu “Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
2. Membangun infrastruktur daerah yang merata memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana;
3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing;
4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; serta
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan melaksanakan program pembangunan pertanian dan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka pencapaian misi nomor 3 (tiga) yaitu memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing sehingga sektor pertanian dan perikanan dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Grobogan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 serta Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Grobogan yang dijabarkan dalam program-program prioritas Bupati Grobogan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya peningkatan SDM pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian. Jumlah program Urusan Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 program dan Urusan Pertanian sebanyak 5 yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan 4 program pelaksanaan.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 kegiatan yang dijabarkan dalam 42 subkegiatan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024**

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	SASARAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	475.000.000
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.340.000.000
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan	500.000.000
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi	11.632.784.000

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	kesekretariatan yang sesuai SOP Persentase pemanfaatan sarana peternakan; Persentase Produksi Bibit Ternak	6.544.500.000
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	1.783.850.000
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan; Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	840.000.000
5. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	500.050.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun ketiga dari Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pendanaan indikatifnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan					Tolok Ukur	
					Dinas Peternakan dan Perikanan					36.691.148.000,00				27.317.566.659,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					36.691.148.000,00				27.013.002.320,00	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.590.000.000,00				2.256.000.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					475.000.000,00				475.000.000,00	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah					475.000.000,00				475.000.000,00	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan										
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	75.000.000,00
					Pembuatan database informasi sumber daya ikan										
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					75.000.000,00					
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5 Unit	100.000.000,00
					Pengadaan bibit ikan										
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					100.000.000,00					
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	275000 Unit	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	275000 Unit	300.000.000,00
					Pengadaan peralatan tangkap ikan ramah lingkungan										
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.615.000.000,00				1.411.000.000,00	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					2.200.000.000,00				750.000.000,00	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil										
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Kelompok	2.200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	6 Kelompok	750.000.000,00

					Pengadaan bantuan bibit ikan dan pakan					2.200.000.000,00					
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000,00					121.000.000,00
3	25	04	2.03	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Rekomendasi	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Rekomendasi	121.000.000,00
					Pembinaan pembudidaya ikan					50.000.000,00					
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					1.365.000.000,00					540.000.000,00
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9 Unit	1.275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Unit	450.000.000,00
					Pembangunan Perkolaman Rakyat					1.275.000.000,00					
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4212 Unit	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4212 Unit	90.000.000,00
					Penyediaan pakan pada BBI					90.000.000,00					
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					500.000.000,00					370.000.000,00
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					500.000.000,00					370.000.000,00
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	316,24 Ton	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	316,24 Ton	290.000.000,00
					Sosialisasi Gemarikan					250.000.000,00					
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										

						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	300 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	300 Pelaku Usaha	80.000.000,00
						Sosialisasi dan Pembinaan Pengusaha Perikanan				250.000.000,00					
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				32.101.148.000,00					24.757.002.320,00
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				17.044.500.000,00					10.730.000.000,00
3	27	02	2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00					300.000.000,00
3	27	02	2.03	01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	50 Laporan	300.000.000,00
						Pembinaan dan Pengawasan Mutu Bibit Ternak				200.000.000,00					
3	27	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00					200.000.000,00
3	27	02	2.05	06		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									
						Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	50 Laporan	200.000.000,00
						Pembinaan dan Pengawasan Produksi Bibit Ternak				200.000.000,00					
3	27	02	2.06			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				16.644.500.000,00					10.230.000.000,00
3	27	02	2.06	01		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
						Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6743 Ekor	16.205.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	6743 Ekor	10.000.000.000,00
						Pengadaan Ternak Sapi (104 KTT)				12.875.000.000,00					
						Pengadaan Ternak Kambing (33 KTT)				3.230.000.000,00					
						Pengadaan Ternak Unggas (1 KTT)				100.000.000,00					
3	27	02	2.06	02		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									

						Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	200 Ton	439.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200 Ton	230.000.000,00
						Pengadaan Pakan dan Hijauan Pakan Ternak				439.500.000,00					
3	27	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.083.850.000,00					1.570.000.000,00
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian				2.083.850.000,00					1.570.000.000,00
3	27	03	2.02	03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	1.183.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	950.000.000,00
						Pembangunan Jalan Produksi Peternakan di 6 KTT				1.183.850.000,00					
3	27	03	2.02	07		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan									
						Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Kab. Grobogan, Grobogan, Getasrejo	-	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	220.000.000,00
						Rehabilitasi Rumah Potong Hewan				200.000.000,00					
3	27	03	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	700.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	400.000.000,00
						Rehabilitasi Puskesmas sebanyak 2 unit				400.000.000,00					
						Pembangunan Kandang Sapi Komunal				300.000.000,00					
3	27	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				840.000.000,00					840.000.000,00
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00					200.000.000,00
3	27	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis									
						Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	36 Laporan	200.000.000,00
						Penyediaan obat dan bahan				150.000.000,00					
						Pembinaan dan Koordinasi				50.000.000,00					
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				90.000.000,00					90.000.000,00
3	27	04	2.02	01		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan									
						Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	36 Laporan	90.000.000,00



					Penyelenggaraan kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan						90.000.000,00				
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00				300.000.000,00
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner										
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	36 Laporan	300.000.000,00
					Penyediaan obat hewan					200.000.000,00					
					Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan Petugas Medik/Paramedik Kesehatan Hewan						100.000.000,00				
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						250.000.000,00				250.000.000,00
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan										
						Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	36 Laporan	200.000.000,00
					Pelaksanaan Gerakan					110.000.000,00					
					Pelaksanaan Pembinaan Jagal dan Pengusaha Peternakan						20.000.000,00				
					Pelaksanaan Sertifikasi Halal RPH						70.000.000,00				
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan										
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	36 Laporan	50.000.000,00
					Penyelenggaraan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan					50.000.000,00					
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						500.050.000,00				790.000.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						500.050.000,00				790.000.000,00
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	60 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Unit	450.000.000,00
					Penyelenggaraan penyuluhan					200.000.000,00					
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	100.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	100.000.000,00
					Sosialisasi, Pembinaan, dan					57.050.000,00					
					Pengadaan mesin pengolah					43.000.000,00					
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota										

						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	240.000.000,00
						Penyelenggaraan sekolah lapang				200.000.000,00					
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.632.748.000,00					10.827.002.320,00
3	27	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				133.585.000,00					155.000.000,00
3	27	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	2 Dokumen	119.142.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	140.000.000,00
						Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.142.500,00					
						Pengelolaan Data Statistik Dinas				15.000.000,00					
						Pengelolaan Website Dinas				52.000.000,00					
3	27	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	20 Laporan	14.442.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	15.000.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.442.500,00					
3	27	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.327.998.000,00					6.414.492.720,00
3	27	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	49 Orang/bulan	6.301.622.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	6.320.923.720,00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.301.622.000,00					
3	27	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	20 Dokumen	26.376.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	93.569.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan semesteran/bulanan.tahunan				26.376.000,00					
3	27	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				297.664.000,00					292.090.000,00
3	27	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	147 Paket	94.964.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	147 Paket	92.062.000,00
						Pengadaan Pakaian Dinas				94.964.000,00					
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	60 Orang	202.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	200.028.000,00
						Pelaksanaan Bimtek				202.700.000,00					
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.127.932.500,00					2.030.483.600,00
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	15 Paket	53.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	104.570.000,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				53.600.000,00					
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8000 Paket	524.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000 Paket	345.840.000,00
						Penyediaan makanan dan				424.000.000,00					
						Penyediaan makanan dan				100.000.000,00					
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	9520 Paket	209.516.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9520 Paket	232.168.600,00
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	21.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.000.000,00
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.000.000,00					
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material										
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	63 Paket	205.716.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	63 Paket	205.717.000,00

					Penyediaan alat tulis kantor					205.716.500,00					
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	1.100.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.122.133.000,00
					Perjalanan Dinas Luar Daerah					600.600.000,00					
					Perjalanan Dinas Dalam Daerah					500.000.000,00					
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	100 Dokumen	13.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	20.055.000,00
					Pengelolaan Arsip Kantor					13.500.000,00					
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										700.000.000,00
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	20 Unit	403.213.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	700.000.000,00
					Pengadaan Laptop dan Printer					203.213.000,00					
					Pengadaan Peralatan Puskesmas					200.000.000,00					
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										727.300.000,00
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	12 Laporan	17.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.300.000,00
					Pembelian benda pos (materai dan perangko)					17.300.000,00					
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	12 Laporan	259.600.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	290.000.000,00
					Penyediaan Jasa Listrik					160.250.500,00					
					Penyediaan Jasa Air					49.350.000,00					
					Penyediaan Jasa Telepon					50.000.000,00					
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	12 Laporan	990.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000,00
					Belanja Alat Kebersihan Kantor					158.400.000,00					
					Honorarium Tenaga Harian					831.600.000,00					
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										507.636.000,00
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	36 Unit	327.780.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	300.000.000,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				327.780.000,00					
3	27	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Grobogan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	215 Unit	150.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	215 Unit	207.636.000,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				150.600.000,00					
3	27	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Grobogan, Purwodadi, Purwodadi	-	7 Unit	597.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	284.564.339,00
						Pemeliharaan rutin gedung				197.075.000,00					
						Rehabilitasi kolam BBI				200.000.000,00					
						Rehabilitasi saluran irigasi BBI				200.000.000,00					

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta memperhatikan kebutuhan prioritas untuk meningkatkan pembangunan peternakan di Kabupaten Grobogan.

Dengan disusunnya Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

Purwodadi,   Maret 2023  
Kepala Dinas Peternakan dan  
Perikanan Kabupaten Grobogan

  
Dr. RIYANTO, M.P.

NIP. 19630510 198903 1 008